

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PRODUKTIF
USAHA MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID 19
DI KANTOR CAMAT MEDAN KOTA**

SKRIPSI

OLEH:

DITA AYU NINGSIH

188520123



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/2/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/2/24

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PRODUKTIF
USAHA MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID 19
DI KANTOR CAMAT MEDAN KOTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area



OLEH :

DITA AYU NINGSIH

188520123

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/2/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/2/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Bantuan Produktif
Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid 19 Di
Kantor Camat Medan Kota


Nama Mahasiswa : Dita Ayu Ningsih
NPM : 188520123
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing


Dr. Beby Mashite Batubara, S.Sos, MAP

Pembimbing I


Eyi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP

Pembimbing II


Dr. Fikri Ghazali, S.Sos, M.Si

Dekan


Ka. Fawzi, S.Sos, M.I.Pol

Ka. Fawzi, S.Sos, M.I.Pol

Tanggal Lulus: 30 September 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Januari 2023

Dita Ayu Ningsih



188520123

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dita Ayu Ningsih

NPM : 188520123

Program Studi: Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Kantor Kecamatan Medan Kota beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 September 2023



(Dita Ayu Ningsih)

ABSTRAK

Program pemberian bantuan dana UMKM di Kecamatan Medan Kota masih belum optimal, karena masih ada masyarakat yang tidak menerima bantuan dan masih ada juga penerima yang tidak sesuai dengan kriteria untuk menerima bantuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dana penyaluran bantuan produktif usaha mikro dan untuk faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan bantuan produktif usaha mikro. Teori penelitian yang digunakan adalah teori implementasi menurut Edward III. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program bantuan BPUM di Kecamatan Medan Kota sudah berjalan cukup baik untuk mengembangkan UMKM di masa Covid-19. Dari segi komunikasi, kecamatan medan kota sudah memberikan sosialisasi dan informasi tentang bantuan usaha mikro. Dari segi sumber daya, sudah direalisasikan sumber daya yang optimal dalam memberikan usaha bantuan mikro. Dari segi disposisi, pihak kecamatan medan kota memberikan komitmen dan bantuan khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi terkait persyaratan bantuan usaha mikro. Terakhir, dari struktur birokrasi, kecamatan medan kota telah memberikan struktur organisasi yang jelas dalam memberikan bantuan usaha mikro.

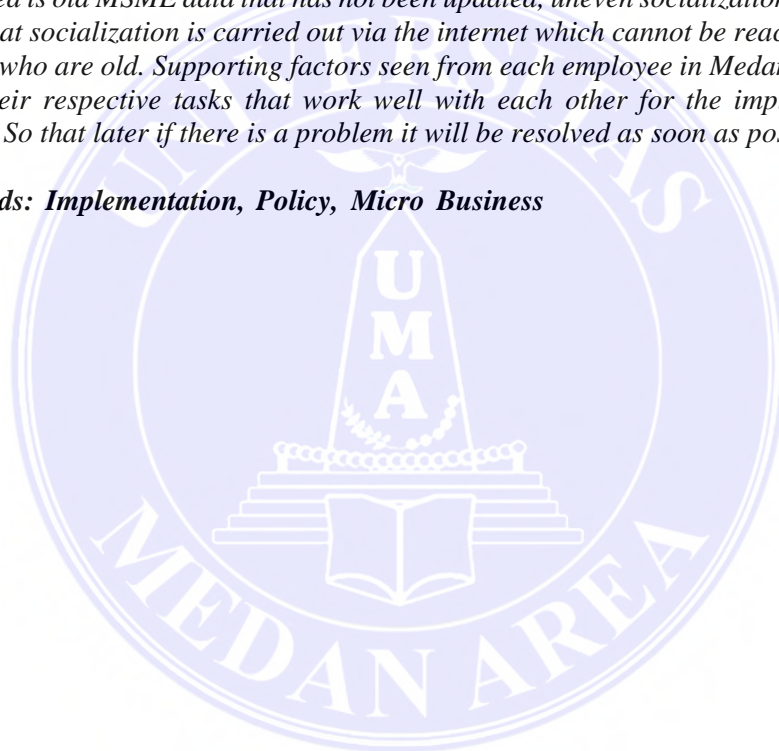
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Usaha Mikro



ABSTRACT

The program for providing MSME funding assistance in Medan Kota District is still not optimal, because there are still people who do not receive assistance and there are still recipients who do not meet the criteria for receiving this assistance. This study aims to determine the implementation of the policy on the distribution of productive assistance for micro-enterprises and the inhibiting factors for the implementation of productive assistance policies for micro-enterprises. The research theory used is implementation theory according to Edward III. The research method used is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of the BPUM assistance program in the Medan City District has gone well enough to develop MSMEs during the Covid-19 period. The implementation of the program has been good, although there are still things that need to be improved so that the program's goals are more precise. As well as the inhibiting factor itself arises from the lack of time given for the process of submitting prospective BPUM recipients so that there are indications that the data submitted is old MSME data that has not been updated, uneven socialization due to Covid-19 so that socialization is carried out via the internet which cannot be reached by MSME owners who are old. Supporting factors seen from each employee in Medan Kota District have their respective tasks that work well with each other for the implementation of BPUM. So that later if there is a problem it will be resolved as soon as possible.

Keywords: *Implementation, Policy, Micro Business*

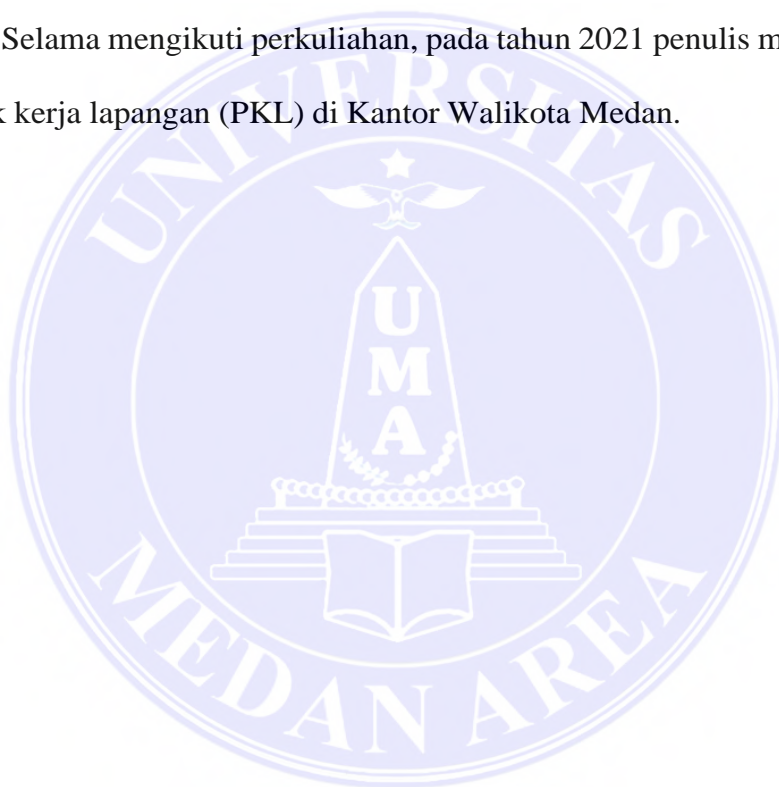


RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di medan pada tanggal 09 Desember 2000 dari bapak Suwitno dan ibu Farida Eriani Lubis. Penulis merupakan putri kedua dari dua bersaudara.

Tahun 2018 penulis lulus dari SMA Negeri 5 Medan dan pada tahun 2018 terdapat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, pada tahun 2021 penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Walikota Medan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atasberkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kantor Camat Medan Kota”** tepat pada waktunya. Penulisan proposal Usulan Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu Program Strata I pada Prodi Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan proposal ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Cinta pertamaku, Ayahanda Suwitno, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, almarhumah ibunda farida eriani lubis, walau tidak dapat hadir namun semangatnya masih melekat terhadap penulis dan kakak saya yang selalu mendoakan dan memberi dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Effiati Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP selaku Dosen pembimbing I saya yang telah memberikan arahan dan waktu selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP selaku Dosen pembimbing II saya yang telah memberikan arahan dan waktu selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Dra. Nurhayati Harahap, MAP selaku Sekretaris yang telah memberikan arahan dan motivasi.
8. Seluruh dosen dan staff pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
9. Dan saya juga berterimakasih kepada teman-teman saya, Ahmad fauzan, Ahmad aji, hana ayunda, dinda, gita, monica, devi, arep, mael, ruth tasya, zizi, bella, adek riana yang sudah sangat membantu saya dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini
10. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
11. Seluruh teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian proposal ini masih belum mendekati kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 30 September 2023

Penulis

Dita Ayu Ningsih

188520123

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan publik.....	8
2.2. Proses Penyusunan Publik.....	10
2.3. Implementasi Kebijakan	11
2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi .	12
2.5. Konsep Program Dana Bantuan Produktif Usaha Mikro.....	15
2.6. Konsep Program dana Banuan UMKM	16
2.7. Regulasi Pemerintah tentang UMKM	17
2.8. Penelitian Terdahulu	18
2.9. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	22
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.2.1. Lokasi Penelitian	23
3.2.2. Waktu Penelitian	23
3.3. Teknik Pengumpulan Data	23
3.3.1. Observasi.....	24
3.3.2. Wawancara.....	24
3.3.3. Dokumentasi	24
3.4. Informan Penelitian	25
3.5. Analisis data.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	35
4.2.1. Implementasi kebijakan bantuan produktif usaha mikro kecil menengah pada Kecamatan Medan kota	35
4.2.2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung Penyaluran bantuan produktif usaha mikro kecil.....	51

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan.....	60
5.2.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN 1	66
LAMPIRAN 2	67
LAMPIRAN 3	68
LAMPIRAN 4	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 2 Waktu Penelitian	23
Tabel 3 Informan Penelitian.....	26
Tabel 4 Luas Wilayah Kecamatan Medan Kota Per Kelurahan.....	31
Tabel 5 Distribusi Penduduk Perkelurahan	32
Tabel 6 Persebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 7 Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	33
Tabel 8 Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 2 Peta Kecamatan Medan Kota	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	66
Lampiran 2	67
Lampiran 3	68
Lampiran 4	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2020 dikejutkan dengan adanya Covid-19 yang menyerang seluruh negara termasuk salah satunya di Indonesia. Oleh sebab itu menimbulkan krisis ekonomi global keseluruh penjuru dunia. Pemerintah Indonesia saat itu terus berupaya untuk menekan laju kenaikan Covid-19 serta berupaya mengatasi akibat yang mencuat di bidang ekonomi.

Pada saat usaha berskala besar mengalami keterpurukan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hanya sebagian saja mampu bertahan dari krisis tersebut. Hal ini disebabkan oleh (1) sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang di hasilkan.

Sebaliknya, kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari Bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu kegiatan usahanya sedangkan UMKM mampu bertahan. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah. Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari perekonomian yang sehat-sehat. Hal ini membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki keunggulan dan berpotensi untuk dikembangkan.

Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi serta meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat, pendapatan masyarakat serta kesejahteraan hidup masyarakat. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia menjadi sebuah tulang punggung sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada kuartal satu tahun 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Pemerintah terus memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah karena usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia.

Bantuan Produktif Usaha Mikro adalah salah satu jenis BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan oleh pemerintah dengan target para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Akan tetapi terdapat pertanyaan apakah BPUM ini efektif membantu para pelaku usaha mikro dalam mempertahankan usahanya karena kebijakan dan pelaksanaannya yang dirumuskan secara cepat. Selain itu dana BPUM dan pencapaian targetnya apakah sudah tepat sasaran baik dari ketepatan penerimanya ataupun ketepatan penggunaan dananya serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok para pelaku usaha mikro di masa pandemi. Pemerintah kembali menyalurkan Program Bantuan Bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan efektivitas serta kualitas data usulan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Besaran BPUM diberikan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan untuk 12 juta penerima yang tidak sedang

menerima kredit perbankan. totalnya nanti untuk 12 juta usaha kecil sebesar Rp2,4 juta. Program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat mengakibatkan tanggungnya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial maka dari itu diberikan berbagai Bantuan seperti donasi beras miskin, serta dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pengembangan UMKM ini wajib menjadi salah satu prioritas. Hal ini sebab usaha tersebut ialah tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditunjukan untuk mengurangi persoalan kesenjangan antara golongan, pendapatan, serta pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja.

UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro adalah “usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan. UMKM merupakan salah satu potensi perluasan kerja untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan”.

Pembagian ekonomi pada hakekatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Secara strategis tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana perubahan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

Pengembangan UMKM ini wajib menjadi salah satu prioritas, hal ini sebab usaha tersebut ialah tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang untuk mengurangi persoalan kesenjangan antara golongan, pendapatan, serta

antar pelaku usaha, pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja.

Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah basis ekonomi kerakyatan, sangat penting peranannya dalam menghadapi fase bonus demografi karena usaha ini akan membuka lapangan pekerjaan, proses pemerataan dan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas negara. Untuk mewujudkan kelancaran UMKM khususnya di masa pandemi maka diperlukan bantuan usaha mikro. Bantuan usaha mikro adalah salah satu jenis BLT yang diberikan pemerintah kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan untuk mendapatkan modal usaha.

Pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan serta pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga bisa meningkatkan kedudukan, peran, serta potensi usaha Mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.

Dinas Koperasi serta UMKM Provinsi Sumatera Utara telah mampu berpartisipasi aktif serta mempunyai tujuan yang benar untuk mencapai visi dan misinya yakni visinya terwujudnya usaha mikro, kecil serta menengah yang tangguh serta mandiri dan mempunyai daya saing dan mampu mensejahterakan pelakunya serta masyarakat Sumatera Utara dan salah satu misinya mengurangi jumlah pengangguran melalui penciptaan wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja oleh Dinas Koperasi serta usaha Mikro, kecil, Menengah. Maka

dengan adanya pemberdayaan UMKM, kelanjutan ancaman pelonjakan penduduk di provinsi Sumatra Utara khususnya di Kota Medan menjadi ibu kota provinsi akan teratasi sekaligus mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek.

Berdasarkan Observasi di lapangan masih ditemukan masalah di program pemberian bantuan dana UMKM di Kecamatan Medan Kota masih belum optimal, karena masih ada masyarakat yang tidak menerima bantuan dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang mendaftar, bahkan beberapa masyarakat membuat usaha agar mendapatkan bantuan UMKM tersebut dan masih ada juga penerima yang tidak sesuai dengan kriteria seperti pelaku usaha yang berada di pematang jalan yang tidak ada izin usahanya untuk menerima bantuan tersebut. Kemudian masih ada juga masalah dalam pemberian bantuan dana UMKM yang mengalami kurangnya informasi dari pihak pencairan dana dalam mengeluarkan dana. Sehingga masyarakat masih menunggu kepastian informasi yang jelas terhadap kendala bantuan dana.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Medan Kota”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah, yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan bantuan produktif usaha mikro untuk usaha mikro kecil menengah pada Kecamatan Medan Kota ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan

bantuan produktif usaha mikro untuk usaha mikro kecil menengah pada Kecamatan Medan Kota ?

1.3. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyaluran bantuan produktif usaha mikro untuk usaha mikro kecil menengah pada Kecamatan Medan Kota.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung upaya dalam menjalankan Implementasi Kebijakan bantuan produktif usaha mikro untuk usaha mikro kecil menengah pada Kecamatan Medan Kota.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menemukan segala sesuatu yang dianggap masih kurang, mengembangkannya serta memperluas dan menguji kebenaran yang sudah ada tapi masih diragukan kebenarannya yang merupakan salah satu ruang lingkup administrasi publik yaitu implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah dan lembaga yang berwenang secara langsung terhadap pengembangan sekaligus pembinaan terhadap setiap UMKM di kecamatan Medan Kota

kelurahan Teladan Barat.

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi terkait dengan Program Bantan Langsung Tunai (BLT) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini kiranya dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi ataupun institusi publik yang memerlukan penerapan serta tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai perihal yang membatasi serta mendukungnya.

Menurut Thomas Dye (1995:2), kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai "*Whatever government choose to do or not to do*". Dengan kata lain, kebijakan itu merupakan upaya untuk memahami apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah, apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan apa dampak dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Adapun menurut Ripley (1985:49), tahapan kebijakan publik meliputi:

- a. Penyusunan Agenda. Dalam hal penyusunan agenda ini dilakukan proses membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah.
- b. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan. Dalam hal ini dilakukan proses pengumpulan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan.
- c. Implementasi Kebijakan. Pada tahap ini diperlukan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan.

- d. Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja, dan Dampak. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru untuk di masa akan datang dengan tujuan kebijakan yang kedepannya akan lebih berhasil.

Menurut Andreson (Tahir,2014:21), “kebijakan merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah Kebijakan Publik, *policy*, menjadi dua: substansif dan prosedural. Kebijakan substansif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan”.

Dalam buku Riant Nugroho D. (2006:31) bentuk kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar yaitu kelima peraturan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Presiden Daerah.
2. Kebijakan publik bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, serta Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar Menteri Gubernur, dan Bupati/Walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

2.2. Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena mengaitkan banyak proses ataupun variabel yang harus dikaji. Oleh sebab itu, sebagian pakar politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap, tujuan pembagian seperti ini merupakan guna mempermudah kita dalam mengkaji kebijakan publik. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, Implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan.

Menurut Rakhmat dalam buku Indra Muda (2019:5) “masalah kebijakan (*policy problem*) adalah masalah publik yang menyangkut kepentingan orang banyak. Masalah kebijakan dapat berupa masalah yang tidak strategis dan masalah strategis, masalah yang strategis mencakup empat syarat, luasnya cakupan, jangka waktu yang panjang, mempunyai ketertarikan yang lusa dengan pihak lain, dan mengandung resiko. Identifikasi masalah kebijakan juga dapat dilihat dari tipe masalahnya seperti, sederhana, sedikit sederhana, dan rumit”.

Evaluasi atau Penilaian Kebijakan secara umum bisa dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakanyang mencakup substansi, implementasi serta dampak Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai sesuatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak cuma dilakukan pada sesi akhir saja, melainkan dilakukan dalam segala proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi sesi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang di usulkan untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan, implementasi ataupun tahap dampak kebijakan.

2.3. Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan di terapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan. Tanpa implementasi suatu kebijakan tak dapat berjalan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari proses kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015:12), “implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan”.

Sedangkan menurut James Plaster dan Stewart dalam buku Indra Muda (2019:76) mengemukakan “implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan”.

Bedasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan

kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Model pendekatan implementasi kebijakan Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*communications*), sumber Daya (*resources*), Sikap (*dispositions atau attitudes*) dan Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*).

2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Van Mater dan Horn (Wibawa, dkk., 1994) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Faktor - faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut Suharno (2015:52-52) adalah:

- a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama, kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun

keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena data yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat- sifat pribadinya.
- d) Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
- e) Adanya pengaruh dari kelompok luar lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- f) Adanya pengaruh keadaan masa lalu maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

Model Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III di dalam buku Deddy Mulyadi (2016: 68-69) menuju empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:

1. Komunikasi keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan apa yang menjaditujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama

sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi, implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjadikan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.5. Konsep Program Dana Bantuan Produktif Usaha Mikro

Kemiskinan bukan hanya tentang permasalahan tidak mampu dalam mencari kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal serta pakaian, tetapi pula dengan minimnya pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaannya turut serta

pada pembangunan dalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya manusia. Dalam rangka menangani hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Presiden produktif Usaha Mikro (Hadiwardoyo, 2020).

Pemerintah telah menerbitkan Praturan Menteri Koperasi, usaha Kecil dan menengah (Permen KUKM) Nomor 6 Tahun 2020. Bantuan banpres BLT UMKM Rp. 2,4 jta atau disebut juga petunjuk pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Diterbitkan untuk melaksanakan praturan menteri koperasi, Usaha kecil Mikro Menengah (Permen KUKM) Nomor 06 tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid -19.

Oleh karna itu salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Selaku upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.

2.6. Konsep Program Dana Bantuan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai kedudukan penting serta strategis dalam pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan. Tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi serta menyerap tenaga kerja, UMKM. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan maupun dihindarkan dari

masyarakat Indonesia, karena keberadaannya sangat bermanfaat pada hal pendistribusian pendapatan masyarakat.

Selain itu pula mampu membangun kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan serta mengembangkan unsur-unsur tradisi serta kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini bisa mengurangi tingkat pengangguran.

Disisi lain UMKM masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala utama yang tak jarang dialami oleh UMKM merupakan keterbatasan akses permodalan atau pembiayaan dari perbankan hal tersebut disebabkan *pertama*, kendala geografis yaitu masi banyak perbankan yang belum mampu menjangkau hingga daerah pelosok serta terpencil. *Kedua*, masalah terkait administratif yaitu sebagian besar UMKM masih dikelola secara manual menggunakan pembukuan atau manajemen perencanaan keuangan yang masih menggabungkan antra uang oprasional rumah tangga dengan usaha. *Ketiga*, adanya keraguan perbankan yang masih menganggap jaminan yang diberikan oleh UMKM tidak layak jika dibandingkan tingginya risiko yang akan ditanggung oleh perbankan.

Bedasarkan amanat peraturan pemerintah koperasi Nomor 02 Tahun 2021 terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengamanatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh.

2.7. Regulasi Pemerintah tentang UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, koperasi dan usaha, mikro, kecil dan menengah. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundangundangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai:

- a) kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi.
- b) kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c) penyelenggaraarn Inkubasi.
- d) Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebagai tolak ukur bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

TABEL 1 PENELITIAN TERDAHULU

No.	Judul Penelitiandan Nama Penelitan	Metode Pelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Implementasi program bpum Dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan Menengah (umkm) di kecamatan moro Kabupaten karimun	Metode Kualitatif	penelitian ini menunjukkan implementasi program BPUM dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum terpenuhi dengan baik, namun dengan dikaitkan George C. Edward III (1980) pernyataan yang terdapat 4 (empat) indikator, maka apakah implementasi program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah mencapai keberhasilan. Dapat dikatakan bahwa implementasi program BPUM Dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Moro belum mencapai keberhasilan	Perbedaannya penelitian ini lebih berfokus terhadap pengembangan ekonomi terhadap umkm.saya berfokus pada usaha program UMKM dengan Cara bantuan langsung tunai
2.	Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara	Metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan Implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai sudah cukup baik. Kebijakan ini telah memberikan manfaat bagi penerimanya yang mayoritas digunakan untuk keberlangsungan usaha, secara konsistensi juga sudah baik dalam pelaksanaannya karena	Perbedaannya penelitian ini berfokus terhadap data Program BPUM sedangkan saya befokus terhadap berjalannya program BPUM.

	(Desi Munika Damayanti		tidak adanya kelonggaran terkait kriteria/syarat. Mulai dari alur mekanisme, penganggaran, proses pendistribusian, kriteria penerima BPUM sampai pada proses ketepatan penggunaan dana bantuan juga sudah terlaksana sesuai dengan juklak yang ada.	
3.	Implementasi program banpres produktif usaha mikro (bpum) untuk pengembangan sektor umkm di masa pandemi studi di kecamatan dukunkabupaten GRESIK	Metode Kualitatif	penelitian ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik. Faktor sumber daya mulai dari fasilitas, wewenang, informasi dan keahlian pegawai sudah terimplementasi dengan baik. Namun, kuantitas pegawai di Kecamatan Dukun masih kurang mencukupi. Faktor struktur birokrasi sudah tersusun dengan baik sehingga memudahkan untuk berkoordinasi antar pelaksana kebijakan, selain itu SOP yang digunakan sudah lengkap dan jelas. Faktor disposisi sudah terimplementasi dengan baik terlihat dari arahan dan respon pihak Kecamatan Dukun terhadap program BPUM sangat baik.	Perbedaanya peneliti berfokus pada faktor penghambat dan faktor pendukung. Tetapi saya berfokus pada program yang dijalankan,
4.	Strategi Peningkatan UMKM di Indonesia	Metode kualitatif	Sektor UMKM merupakan sektor yang penting di Indonesia bagi pembentukan PDB. UMKM juga menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan. Strategi yang diperlukan dalam meningkatkan UMKM adalah dengan jiwa kewirausahaan masyarakat agar muncul pengusaha baru yang dapat menciptakan kegiatan usaha dan lapangan pekerjaan serta mampu mengelola resiko	Jurnal ini membahas bagaimana pentingnya dan tujuan serta manfaat dari adanya UMKM di indonesia dan persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada realisasi dan pentingnya UMKM di Indonesia

			dengan baik.	
5.	Peran UMKM dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Metode Kualitatif	UMKM memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mampu memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Peranan UMKM berfokus kepada sarana untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan memberikan pemasukan devisa bagi negara	Jurnal ini membahas bagaimana pentingnya dan tujuan serta manfaat dari adanya UMKM di Indonesia dan persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada realisasi dan pentingnya UMKM di Indonesia

2.9. Kerangka Pemikiran

Menurut Polancik (2009: 18) kerangka pemikiran artinya “suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research), dan mempersentasikan suatu himpunan serta beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut”.

George C. Edward III (1980) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect on Implementation. Dalam pendekatan yang dijelaskan oleh Edward III. Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi menurutnya akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan atau di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten.

GAMBAR 1 KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimaksud ialah dengan menggunakan keterangan data yang didapat pada waktu penelitian di lapangan berupa data-data yang secara tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang terlibat. Buat mencari data-data yang di peroleh serta di himpun oleh informan kemudian dikumpulkan serta tersaji dalam bentuk kalimat-kalimat. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana peneliti terjun ke lapangan dengan melakukan observasi secara langsung serta melakukan wawancara terhadap narasumber.

Dalam buku Imam Gunawan (2016:82) menurut Bodgan & Taylor penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif dimana pemecahan masalah yang dimana berdasarkan fakta yang terlihat di lapangan. Maka, penulis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan bantuan usaha mikro untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan maka penelitian melakukan penelitian di Kantor Camat Medan Kota Kelurahan Teladan Barat.

Jl. Stadion No.3, Teladan Barat., Kec. Medan Kota, Kota Medan.

3.2.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian di Kantor Camat Medan Kota Kelurahan Teladan Barat sebagai berikut:

TABEL 2 WAKTU PENELITIAN

No.	Uraian Kegiatan	Okt 2021	Jan 2022	Mar 2022	Sep 2022	Okt 2022	Mar 2023	Mei 2023	Jun 2023
1.	Pengajuan Judul	■							
2.	Bimbingan Proposal		■						
3.	Seminar Proposal			■					
4.	Data/ Penelitian				■				
5.	Seminar Hasil						■		
6.	Perbaikan Skripsi							■	
7.	Sidang								

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini maka dilakukan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

3.3.1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati

secara langsung terhadap obyek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto (2012:179) Observasi merupakan “pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan pengindraan”.

3.3.2. Wawancara

Dalam metode penelitian kualitatif wawancara sebagai metode pengumpulan data yang utama. Menurut setyadin (dalam Imam Gunawan, 2016:160) “wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu serta merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Serta peneliti melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi”.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan penyaluran bantuan usaha mikro untuk usaha mikro kecil dan menengah.

3.3.3. Dokumentasi

Menurut Imam Gunawan (2016: 175) mengemukakan bahwa sejumlah besar fakta serta data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Umumnya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, afterfak, foto, serta sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang serta waktu sehingga

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal – hal yang pernah terjadi di waktu silam. Hasil wawancara akan lebih baik apabila didukung oleh dokumen-dokumen, dan menambah informasi tentang implementasi kebijakan dana bantuan langsung tunai.

3.4. Informan Penelitian

Dalam penelitian, informan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan data serta informasi. Menurut Afrizal (2016:139) informan penelitian merupakan orang yang menyampaikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain juga suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Informan kunci

Menurut Afrizal (2016:139) informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Rahmaini, SP. Kepala Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, yang di arahkan oleh Camat Medan Kota.

b. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan inti yaitu: Kepala Seksi Ramhaini, SP, Kholida zia ulfa, selvi (pegawai).

c. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) Informan tambahan merupakan orang yang

dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis serta pembahasan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan tambahan yaitu : Pak Muslimin Rangkuti, Ibu Soraya Rahman, Ibu Afriani.

Tabel 3 Informan Penelitian

Informan Penelitian	Nama	Jabatan
Informan kunci adalah <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi yang diarahkan oleh Kepala Camat Medan Kota. • Kepala Bidang penyusun rencana kemitraan umkm 	Rahmaini,SP. Dira Fitri Kusuma Dewi	Bidang Kepala Seksi Kepala Bidang
Informan Utama	Kholida zia ulfa Selvia	Pegawai Kantor Camat
Informan Tambahan	Ibu Soraya Rahman Ibu Afriani Pak Muslimin Rangkuti	Masyarakat

3.5. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dalam Sugiyono (2019: 319) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga memudahkan dalam memahami, dan hasil temuan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan beberapa alat bantu analisis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019: 321) menyatakan bahwa dalam aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Berikut ini aktivitas yang dimaksud, yaitu:

a. Pengumpulan data (*data collection*).

Peneliti akan melakukan penjelajahan secara umum terhadap informasi situasi sosial atau objek yang diteliti, semua dilihat dan didengar. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi data (*data reduction*).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya

c. Penyajian data (*data display*).

Kegiatan ini dilakukan setelah mereduksi data sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

d. *Conclusion drawing/verification*.

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan tersebut kredibel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program bantuan BPUM di Kecamatan Medan Kota sudah berjalan cukup baik untuk mengembangkan UMKM di masa Covid-19. Program tersebut sudah baik penerapannya meskipun masih ada yang harus dibenahi agar sasaran program lebih tepat. Aspek impementasi yang meliputi komunikasi sudah dilakukan dengan baik dengan adanya komunikasi dari pihak pemerintah yang memberitahukan informasi mengenai program bantuan kepada masyarakat. Dari aspek sumberdaya sudah dilakukan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya sumberdaya yang tersedia yang menentukan keberhasilan implementasi. Sumberdaya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Dengan ini dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Dari aspek disposisi sudah dilakukan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya arahan dan respon terkait pelaksanaan BPUM di Kecamatan Medan kota serta adanya bantuan dari berbagai pegawai pemerintah yang ada. Dari apek struktur organisasi sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya pegawai yang tertata dengan baik dan setiap seksi di Kecamatan Kota Medan mampu berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menyukseskan program BPUM. Strukrur organisasi yang teratur, hubungan antar seksi di

Kecamatan Kota Medan yang baik dan kualitas informasi yang nantinya memberikan informasi kepada masyarakat apabila datanya memiliki persyaratan kurang lengkap nantinya pegawai yang memproses data tersebut mengecek dan membantu untuk melakukan perbaikan, dengan ini dapat memudahkan masyarakat dalam menerima bantuan program tersebut. Dengan demikian, pihak kecamatan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan bantuan modal usaha mikro.

2. faktor penghambat sendiri muncul dari minimnya waktu yang diberikan untuk proses pengajuan calon penerima BPUM, sehingga ada indikasi bahwa data yang diajukan adalah data UMKM lama yang belum diperbaharui, dan kurang meratanya sosialisasi disebabkan Covid-19 sehingga sosialisasi dilakukan melalui media sosial yang belum bisa dijangkau oleh pemilik UMKM yang sudah berusia lanjut, serta kurangnya staf pada seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di Kecamatan Kota Medan.
3. faktor pendukung yaitu struktur birokrasi di Kecamatan Medan Kota. Setiap seksi dan pegawai di Kecamatan Medan Kota memiliki tugas masing-masing yang saling berkaitan dan bekerja sama dengan baik untuk menyukseskan pelaksanaan BPUM. Sehingga jika ada masalah akan diatasi secepat mungkin.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya oleh peneliti, bahwa program BPUM di Kecamatan Medan Kota sudah berjalan dengan baik. Peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat

dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku kebijakan dalam pelaksanaan BPUM khususnya di Kecamatan Medan Kota untuk memaksimalkan pelaksanaan program BPUM pada tahun yang akan datang, sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas komunikasi serta koordinasi yang baik antara pelaku kebijakan yakni Diskoperindag Kota Medan, Kecamatan Kota Medan, dan pemerintah kelurahan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman di lapangan terkait pelaksanaan program BPUM.
2. Peneliti merekomendasikan untuk dilakukan penambahan jumlah staf seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di Kecamatan Medan Kota guna meningkatkan produktifitas serta membangun kapasitas untuk pekerjaan baru.
3. Sosialisasi program dapat dilakukan sampai ke tingkat desa/lingkungan agar informasi terkait adanya program BPUM lebih merata sebab tidak semua masyarakat memiliki akses media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Afrizal, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anderson, 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto Suharsimi, 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gunawan, Imam, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dye, T. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, George C (1980). *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Muda, Indra, 2019. *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Medan: MediaPersada
- Muda, Indra, 2019. *Teori Administrasi Publik*. Medan: Area University Press.
- Mulyadi, 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mulyadi, D. 2016. *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Pengertian Pencapaian Implementasi*. Bandung :Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Bentuk Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ripley, R.B. (1985). *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Inc.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Roring, Andreas Delpiero., Michael S & Marlien T. 2021. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam PenangananVirus Corona di Desa*

Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.
Jurnal Governace. Vol.1, No. 2

Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan publik, Intermedia Jakarta.

Winarno, B (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.
Yogyakarta: CAPS

JURNAL

Karmila Fitriyanti. (2022). *Implementasi program Bpum dalam pengembangan Usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di kecamatan Moro Kabupaten karimun. Skripsi.tanjung pinang: Fisip Universitas Maritim raja Ali Haji.*

Desi munika damayanti (2018). *Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.*

RoZIAH Eva. (2022). *Implementasi Program banpres produktif Usaha Mikro (Bpum) Untuk Pengembangan Sektor Umkm di Masa Pandemi studi di Kecamatan Dukun Kabupaten Gersik. Skripsi, Surabaya: Fisip Universitas Negeri Surabaya.*

Sony hendra premana (2017). *Strategi Peningkatan UMKM di Indonesia.*

Kadeni ninik srijani (2020). *Peran UMKM dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Skripsi, Universitas PGRI Madiun.*

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 (Tentang Ciptkerja)

Peraturan Menteri dan koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 6, Tahun 2020 (Tentang Penyaluran bantuan).



LAMPIRAN 1

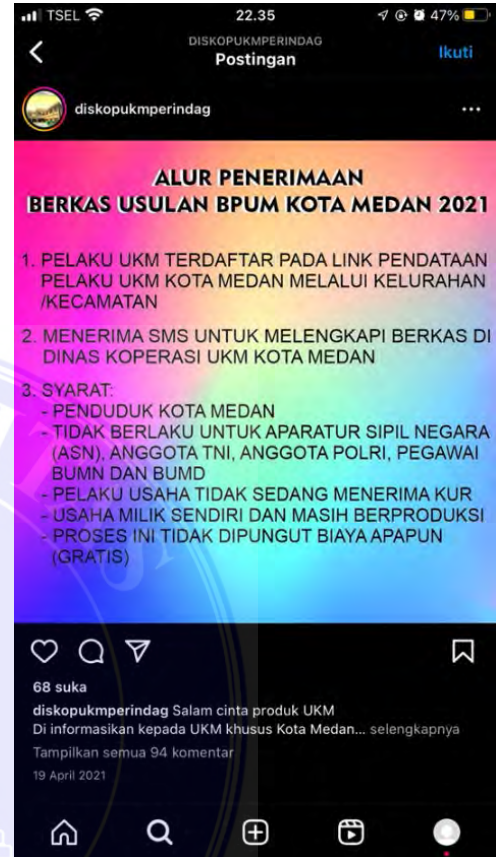
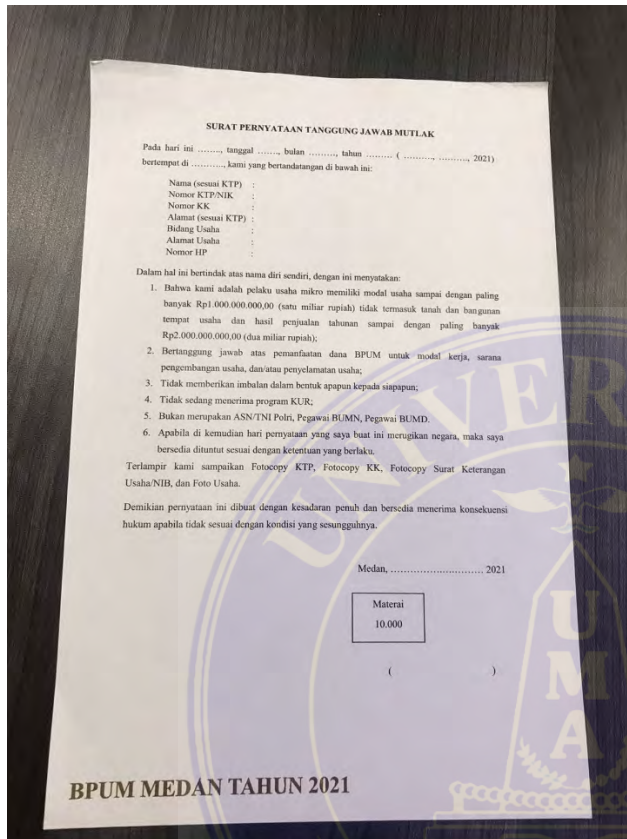
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. **Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pemerintah Kecamatan Medan Kota**
 - a. Bagaimanakah komunikasi sejak adanya BPUM?
 - b. Bagaimanakah penentuan ditetapkan sebagai penerima BPUM?
 - c. Berapa besar UMKM penerima BPUM
 - d. Adanya syarat UMKM mendapatkan bantuan BPUM
 - e. Faktor yang di anggap sebagai faktor pendukung dalam implementasi program BPUM di kecamatan Medan Kota
 - f. Faktor penghambat implementasi kebijakan penyaluran bantuan produktif usaha mikro bagi umkm di kecamatan medan kota.

2. **Daftar pertanyaan Wawancara Kepada Pelaku Usaha Kecamatan Medan Kota**
 - a. Apakah pihak Kecamatan Medan Kota memberikan informasi mengenai adanya BPUM?
 - b. Apakah para pelaksana memberikan informasi kepada masyarakat?
 - c. Apakah adanya program BPUM dapat membantu?
 - d. Apakah program BPUM sesuai yang diharapkan?
 - e. Apa saja persyaratan khusus untuk mendapatkan BPUM?
 - f. Apa saja faktor pendukung dalam penyaluran BPUM?
 - g. Apa saja faktor penghambat dalam program

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Surat Pengajuan Bantuan BPUM

Infomasi Program BPUM di media sosial

LAMPIRAN 3

SURAT MENYURAT

a. Surat Keterangan Pengambilan Data/Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 857 /FIS.2/01.10/VII/2022
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

18 Juli 2022

Yth,
Bapak Camat Kecamatan Medan Kota Kelurahan Teladan Barat
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Dita Ayu Ningsih
N P M : 188520123
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Camat Kecamatan Medan Kota Kelurahan Teladan Barat, dengan judul Skripsi "Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Usaha Mikro Di Kantor Camat Medan Kota"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



b. Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN KOTA

Jalan Stadion No. 3 Medan-20217
☎ (061) 7332048

Medan, 22 September 2022

Nomor : 070 / 1763

Kepada Yth :

Lamp. : -

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Medan
Area

Perihal : Selesai Penelitian

di-

Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/1600/Balitbang/2022, Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Penelitian, maka diberitahukan bahwa:

Nama : Dita Ayu Ningsih
NPM : 188520123
Program Studi : Administrasi Publik

1. Telah selesai melaksanakan Penelitian dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2022 di Kecamatan Medan Kota Medan.
2. Dalam melaksanakan Penelitian Mahasiswa patuh dan taat kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.


RAJAJAN ANDOSTUBIS, S.STP, M.AP
PEMBINA
NIP. 19840101 200312 1 001

Tembusan :

- Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Medan (sebagai laporan)
- Peringgal

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Dinaskoperindag Kota Medan



Kantor kecamatan medan kota



**Foto bersama Kepala Bidang Penyusun rencana
Dan kemitraan UMKM**



**Foto bersama Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembaga**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Foto bersama pegawai kecamatan medan kota



Dokumentasi Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Afriani

Selaku pelaku Usaha



Dokumentasi Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Pak muslimin Rangkuti Selaku pelaku Usaha



Dokumentasi Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Soraya rahman Selaku pelaku Usaha